



Tunjangan Jabatan Tuntut Realisasi

Jarot Pastikan Diakomodir APBD Perubahan

SINTANG, TRIBUN - Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Kantor Bupati Sintang, Rabu 11 September 2024 pagi.

Aksi tersebut untuk menuntut pemerintah daerah Kabupaten Sintang agar merealisasikan Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades, perangkat desa dan BPD.

Sebelum menyampaikan aspirasi ke kantor bupati, massa aksi yang tergabung dalam PAPDESI, APDESI dan PPDI berkumpul di Taman Entuyut. Mereka yang hadir bukan hanya dari Kota Sintang, tapi juga perwakilan dari desa-desa yang berada di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. "Bupati sudah menerbitkan aturan, tapi sampai saat ini belum dilaksanakan," sesal Ketua Apdesi Kabupaten Sintang, Dede Hendranus.

Sejak Perbup Nomor 2 dibuat, para Kades, perangkat desa hingga BPD hanya menerima penghasilan tetap. Seharusnya, jika mengacu aturan Perbup, mereka memperoleh tunjangan jabatan.

"Adapun tunjangan yang harusnya kami terima yang diatur dalam perbup. Pertama tunjangan jabatan, tunjangan suami atau istri.



Jadi kami menganggap pemerintah lalai dalam melaksanakan perbup yang telah diterbitkan.

Dede Hendranus
Ketua Apdesi Kabupaten Sintang

Tunjangan anak. Dan tunjangan kesehatan," ungkap Dede.

Berdasarkan Perbup, tunjangan jabatan kades perbulan sekitar Rp 606.750 ribu rupiah. Tunjangan Sekdes Rp 556.250 ribu rupiah. Tunjangan Kaur, Kasi dan Kadus Rp 505.750 ribu.

"Sampai saat ini tidak ada sepeserpun yang dibayarkan oleh pemerintah kepada kami. Jadi kami menganggap pemerintah lalai dalam melaksanakan perbup yang telah diterbitkan. Kami hanya menerima penghasilan tetap 2.400.000 saja," ungkap Dede.

Ketua DPC PAPDESI Kabupaten Sintang, Akon menambahkan jika aksi ini hanya menuntut kejelasan dari pemerintah soal realisasi Perbup. Padahal, aturan itu

sudah dibuat 2 tahun lalu.

"Aturan sudah dibuat oleh Bupati tahun 2022 tapi belum dilaksanakan sehingga menjadi tuntutan kawan perangkat desa makanya kami menuntut hak kami," jelas Akon.

Menurut Akon, wajar jika kades dan perangkatnya menuntut hak kepada pemerintah. Sebab, tugas dan tanggungjawabnya di desa itu sangat besar.

"Bahkan lebih besar dari pemda. Itu yang jadi keinginan kami semoga apa yang menjadi tuntutan kami dapat dipenuhi. Seperti yang sudah disepakati oleh pemda, katanya bakal mewujudkan perbup. Jangan sampai peraturan dibuat tapi tidak dilaksanakan," ujar Akon.

Bupati Sintang, Jarot Winarno memastikan akan mengakomodir tuntutan para Kades dan Perangkat Desa se-Kabupaten Sintang.

Jarot memastikan, Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades, perangkat desa dan BPD akan diakomodir dalam APBD Perubahan tahun 2025.

"Akan kita akomodir di APBD Perubahan 2025," kata Jarot, Rabu 11 September 2024. Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Kantor Bupati Sintang, Rabu 11 September 2024 pagi.

Aksi tersebut untuk menuntut pemerintah daerah Kabupaten Sintang agar merealisasikan Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades, perangkat desa dan BPD.

Sebelum menyampaikan aspirasi ke kantor bupati, massa aksi yang tergabung dalam PAPDESI, APDESI dan PPDI berkumpul di Taman Entuyut. Mereka yang hadir bukan hanya dari Kota Sintang, tapi juga perwakilan dari desa-desa yang berada di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang.

Menurut Jarot, Perbup tersebut tidak bisa diakomodir di 2025 karena APBD murni sudah ketok palu. Sehingga, hanya bisa diakomodir di perubahan.

Anggota DPRD Sintang, Rudy Andreas juga akan mengawal realisasi Perbup saat pembahasan APBD Perubahan 2025. "Kami dari DPRD Sintang tentu sangat mendukung aksi yang telah dilakukan oleh teman teman kades dan perangkat desa. Kami akan kawal di APBD perubahan," kata Rudy Andreas. (Ags)



TRIBUN PONTIANAK/AGUS PUJIANTO

TUNTUTAN - Bupati Sintang, Jarot Winarno memastikan akan mengakomodir tuntutan para Kades dan Perangkat Desa se-Kabupaten Sintang. Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Kantor Bupati Sintang, Rabu 11 September 2024 pagi.